



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGESAHAN RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2017 - 2018**

TANGGAL 21 AGUSTUS 2017

Tahun Sidang	: 2017 - 2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Senin, 21 Agustus 2017.
P u k u l	: 14.50 WIB s/d 15.28 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 – 2018.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 25 orang, izin 10 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 – 2018 (16 Agustus s.d. 27 Oktober 2017) sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang ditugaskan oleh Bamus DPR RI, yaitu :
 - RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 5 (lima) RUU, yaitu :
 - RUU tentang Penyiaran (diusulkan oleh Komisi I);
 - RUU tentang Perkelapasawitan (diusulkan oleh Anggota lintas fraksi);
 - RUU tentang Minyak dan Gas Bumi (diusulkan oleh Komisi VII);
 - RUU tentang Badan Usaha Milik Negara (diusulkan oleh Komisi VI); dan
 - RUU tentang Masyarakat Adat (diusulkan oleh Anggota Fraksi Partai NasDem).
 3. Melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dengan mengundang pihak-pihak terkait dengan undang-undang tersebut.
 4. Melakukan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.
 5. Melakukan penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.
 6. Melakukan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018; dan
 7. Penyelenggaraan workshop legislasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 5-7 September 2017.
- B. Tanggapan Anggota Terhadap Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018, sebagai berikut :
1. Terkait dengan bahan-bahan rapat, kiranya Sekretariat dapat mengirimkan bahan rapat yang dikirimkan oleh Pemerintah atau narasumber minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.
 2. Permintaan agar Pemerintah/Narasumber dapat memberikan bahan rapatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat agar bahan-bahan tersebut dapat dipelajari terlebih dahulu oleh Anggota.
 3. Mengusulkan agar Pimpinan Badan Legislasi dapat bertindak tegas terhadap Pemerintah yang menyampaikan bahan rapat dihari pelaksanaan kegiatan dengan membatalkan atau menunda rapat tersebut.
 4. Meminta untuk RUU tentang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren dapat dijadwalkan oleh Badan Legislasi dan dilakukan pengharmonisasian.
 5. Meminta Badan Legislasi untuk tetap melakukan proses pengharmonisasian RUU tentang Perkelapasawitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adanya permasalahan dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara kiranya Badan Legislasi tetap dapat melanjutkan proses pembahasan RUU tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bukti komitmen dari DPR untuk menjaga martabat DPR.
7. Meminta agar RUU tentang Sumber Daya Air dan RUU tentang Jalan untuk segera masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 Perubahan dan meminta Badan Legislasi untuk dapat segera menjadwalkan pertemuan dengan Pemerintah.
8. Mengusulkan untuk mengundang kembali Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB terkait dengan RUU-RUU yang pembahasannya terhambat.
9. Mengusulkan agar Menpan RB dapat dijadikan narasumber dalam workshop legislasi yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi, dengan materi terkait dengan manajemen lembaga.
10. Untuk RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan, diharapkan Pemerintah dapat melihat bahwa pembentukan lembaga di dalam RUU tersebut merupakan integrasi badan-badan karantina yang sudah ada dan bukanlah lembaga baru, hal ini kiranya dapat ditekankan kepada Pemerintah agar RUU ini dapat segera diselesaikan.
11. Meminta kepada Tim Ahli untuk mempersiapkan materi workshop legislasi dengan lebih baik dan berkualitas, mengingat workshop tersebut bersifat nasional dan akan datang mengundang banyak pihak.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 Menyetujui rancangan jadwal rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 dengan catatan bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan /kebutuhan.

Rapat ditutup pukul 15.28 WIB.

Jakarta, 21 Agustus 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001